

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Masalah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen produksi akan selalu meningkat dalam jumlah dan kualitas. Jumlah barang modal akan meningkat sebagai hasil dari investasi. Teknik yang digunakan terus berkembang. Selain itu, pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan tenaga kerja, dan pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan ketrampilan. Pada umumnya, peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa tidak selalu diikuti oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Kadang-kadang, peningkatan produksi yang sebenarnya lebih kecil daripada peningkatan potensi produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2004).

Karesidenan adalah istilah yang digunakan pada masa kolonial Belanda untuk mengelompokkan beberapa kabupaten atau kota di Indonesia menjadi satu wilayah administrasi yang lebih besar. Di Jawa Tengah, Karesidenan mengacu pada beberapa wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan administratif. Karesidenan Kedu merupakan salah satu wilayah administrasi di Jawa Tengah, Indonesia, yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, termasuk Magelang,

Temanggung, Wonosobo, Kebumen, dan Purworejo. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan infrastruktur, investasi, sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Selain Karesidenan Kedu di Jawa Tengah memiliki 5 Karesidenan lain, antara lain Karesidenan Banyumas, Surakarta, Semarang, Pati dan Pekalongan. Yang berarti Jawa Tengah memiliki 6 Karesidenan diwilayahnya.

Menurut Indraswari dan Rudatin (2022), pendapatan domestik regional bruto (PDRB), suatu indikator pertumbuhan ekonomi, digunakan untuk menunjukkan peningkatan produksi barang atau jasa. Dengan demikian, ekonomi suatu wilayah dianggap meningkat. Dari enam wilayah karesidenan di Jawa Tengah, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015–2020 terendah terjadi di Karesidenan Banyumas dengan 3,76%; urutan kedua adalah Karesidenan Kedu dengan 4,07%, dan urutan ketiga adalah Karesidenan Semarang dengan 4,47%. Kota Magelang mencatat pertumbuhan ekonomi paling lambat selama tiga tahun terakhir sebesar -2,45%. Sebaliknya, Kabupaten Wonosobo mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,61% pada tahun 2019 (Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pertumbuhan ekonomi terendah dan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Kedu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Kedu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerahnya. Sebagai pembantu urusan pemerintah pusat,

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendorong usaha. Pemerintah daerah dapat menggunakan haknya untuk mengelola sumber daya yang ada dan memanfaatkannya secara efisien dalam kegiatan entrepreneurship. Ekonomi Kabupaten/Kota Karesidenan Kedu tumbuh paling lambat setelah Karesidenan Banyumas. Yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena tenaga kerja dan investasi belum sebaik dan sebesar Karesidenan yang lain.

Dalam ekonomi Islam, PDRB dapat menjadi indikator yang tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. PDRB yang tinggi harus diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata, memastikan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta menghindari penumpukan harta di tangan segelintir orang. Sistem ekonomi yang adil adalah salah satu tujuan utama dalam Islam. Distribusi kekayaan harus merata dan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ini mengajarkan pentingnya kebijakan redistribusi yang adil dalam perekonomian modern. Yang tertuang dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2:29) :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(٢٩)

Artinya : "*Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menjadikannya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk kepentingan dan manfaat manusia. Semua sumber daya alam, baik yang

terlihat maupun yang tersembunyi, diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan bijaksana. Dalam konteks ekonomi, ayat ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama dan pertumbuhan ekonomi. Namun, manusia juga harus selalu mengingat bahwa segala yang diciptakan di bumi adalah amanah dari Allah, sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab dan adil.

Tabel 1.1
PDRB dan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 6 Kota dan Kabupaten di Karesidenan Kedu Tahun 2021 hingga 2023

Kota/ Kabupaten	PDRB			Rata-Rata EG Tahun 2023-2022 (%)
	2023	2022	2021	
Kota Magelang	7,264,923,660, 000	7,264,923,660, 000	6,513,894,680, 000	5.76%
Kabupaten Magelang	26,211,563,240 ,000	24,953,184,970 ,000	23,661,713,240 ,000	5.25%
Kabupaten Temanggung	16,997,526,820 ,000	16,187,374,830 ,000	15,387,930,440 ,000	5.10%
Kabupaten Kebumen	22,638,895,330 ,000	21,425,793,420 ,000	20,253,059,430 ,000	5.73%
Kabupaten Purworejo	15,025,908,550 ,000	14,300,556,840 ,000	13,573,469,540 ,000	5.21%
Kabupaten Wonosobo	15,405,984,620 ,000	14,770,503,780 ,000	14,064,764,700 ,000	4.66%

Sumber : BPS Jawa Tengah (Data diolah)

Secara umum, setiap kota/kabupaten menunjukkan tren peningkatan PDRB dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah-wilayah tersebut. Semua wilayah menunjukkan pertumbuhan PDRB yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2023. Pertumbuhan tahunan rata-rata berkisar antara 4.3% hingga 11.5%. Kota Magelang mengalami

peningkatan signifikan dari 2021 ke 2022 tetapi stabil dari 2022 ke 2023. Data ini menunjukkan bahwa Karesidenan Kedu mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif selama periode 2021-2023, yang merupakan indikator baik bagi pembangunan daerah tersebut.

Investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks investasi, terdapat dua jenis utama yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh pihak asing di suatu negara. PMA melibatkan investasi modal dari perusahaan atau individu dari luar negeri ke dalam negara penerima investasi, biasanya dalam bentuk pendirian pabrik, perusahaan, atau usaha lainnya. PMA memainkan peran penting dalam mengisi kesenjangan modal, transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh warga negara atau perusahaan dalam negeri di negaranya sendiri. PMDN mencakup investasi dalam bentuk pembangunan pabrik, usaha bisnis, properti, dan infrastruktur lainnya oleh investor domestik.

PMA maupun PMDN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. PMA membawa teknologi baru, keahlian, dan akses pasar internasional, sementara PMDN memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Kombinasi yang efektif dari keduanya dapat membantu mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan yang digunakan pada skripsi ini adalah investasi PMDN,

dikarenakan dapat melihat bagaimana sumber daya atau produksi lokal berkembang.

Menurut Todaro dan Smith (2015), PMDN memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. PMDN membantu dalam pengembangan kapasitas produksi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Todaro dan Smith menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan menurut Jhingan (2010), PMDN sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena menggunakan sumber daya lokal dan memanfaatkan potensi pasar domestik. Jhingan juga menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam PMDN.

Tabel 1.2
Investasi Karesidenan Kedu Tahun 2021-2023

Kota/ Kabupaten	Investasi		
	2023	2022	2021
Kota Magelang	237,691,600,000	116,714,900,000	289,066,100,000
Kabupaten Magelang	1,124,873,500,000	892,603,600,000	309,145,000,000
Kabupaten Temanggung	172,781,200,000	141,770,700,000	94,001,400,000
Kabupaten Kebumen	257,838,000,000	135,572,300,000	106,715,000,000
Kabupaten Purworejo	138,975,300,000	67,572,000,000	44,815,300,000
Kabupaten Wonosobo	257,592,100,000	92,517,500,000	226,642,100,000

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Secara umum, hampir semua kota/kabupaten menunjukkan kenaikan investasi dari tahun 2021 hingga 2023. Beberapa kota/kabupaten menunjukkan variabilitas yang signifikan dalam investasi dari tahun ke tahun. Kota Magelang 2021 ke 2022, investasi menurun dari 289,066 juta menjadi 116,715 juta, Penurunannya sekitar 59.6%. Kabupaten Magelang saat 2022 ke 2023 investasi meningkat dari 892,604 juta menjadi 1,124,874 juta, peningkatan sekitar 26.1%. Sebagian besar wilayah mengalami peningkatan investasi yang signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya daya tarik investasi yang meningkat di wilayah tersebut. Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan investasi pada tahun 2022 tetapi pulih dengan peningkatan besar pada tahun 2023. Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan investasi yang konsisten dan terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Dalam pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dan ketergantungan dengan tenaga kerja atau sering disebut angkatan kerja. Menurut Rizky dan Hartono (2022), tenaga kerja adalah inti dari pertumbuhan dan perekonomian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif. Untuk pertumbuhan ekonomi, keseimbangan penggunaan tenaga kerja diperlukan. Tenaga kerja dan output berhubungan erat. Produksi tenaga kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan output per pekerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi berkembang, jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan meningkat.

Menurut Mohamed (2016), berbagai faktor termasuk pertumbuhan ekonomi, PHK, upah minimum, bencana alam, dan investasi baru di daerah, berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk bekerja. Karena akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, terutama negara berkembang, penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut harus sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada. Di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, permintaan tenaga kerja akan tinggi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia. Di sisi lain, di negara berkembang, permintaan tenaga kerja rendah karena perlambatan ekonomi, yang akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja.

Menurut Naeningru (2019), dari 2012 hingga 2017, jumlah pekerja di Karesidenan Kedu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, terdapat 2534394 angkatan kerja di Karesidenan Kedua, 2430036 yang terserap untuk bekerja, dan 106358 pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran di karesidenan kedua tidak menurun setelah penurunan angkatan kerja sebanyak 100.469 jiwa pada tahun 2013 dari tahun sebelumnya; sebaliknya, tingkat pengangguran meningkat menjadi 125.004 jiwa dan jumlah orang yang bekerja menurun menjadi 2.308.921 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah angkatan kerja di karesidenan kedua meningkat sebanyak 163.705 jiwa menjadi 2597630, dan jumlah orang yang bekerja juga meningkat sebanyak 2.308.921 jiwa. Tetapi, pengangguran justru meningkat sebanyak 5.437 orang pada tahun 2014, meningkatkan total pengangguran terbuka di karesidenan Kedu menjadi 130.441 orang.

Tabel 1.3
Angkatan Kerja Karesidenan Kedu Tahun 2021-2023

Kota/ Kabupaten	Angkatan Kerja		
	2023	2022	2021
Kota Magelang	69199	66834	66086
Kabupaten Magelang	833166	822090	774589
Kabupaten Temanggung	482651	472789	454927
Kabupaten Kebumen	813172	658337	620127
Kabupaten Purworejo	469977	412129	415299
Kabupaten Wonosobo	519797	453724	428053

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Dari tabel 1.3, menunjukkan bahwa hampir semua kota/kabupaten menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun 2021 hingga 2023. Beberapa kota/kabupaten menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam angkatan kerja dari tahun ke tahun. Sebagian besar wilayah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah angkatan kerja dari tahun 2021 hingga 2023. Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan angkatan kerja yang luar biasa dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 23.55%. Kabupaten Purworejo mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 tetapi pulih dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan moderat. Data ini menunjukkan bahwa wilayah Karesidenan Kedu mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah angkatan kerja, yang merupakan indikator positif bagi perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Menurut Maharani dan Isnowati (2014), studi tentang pengeluaran pemerintah, yang merupakan bentuk nyata dari intervensi pemerintah dalam perekonomian, telah menjadi fokus utama. Cheng (1997) melakukan penelitian terhadap beberapa negara Asia, termasuk Korea Selatan. Dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregressive (VAR), dia menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara peningkatan ekonomi Korea Selatan dan pengeluaran pemerintah. Studi lain, seperti Singh dan Sahni (1984) dan Ram (1986), juga menunjukkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut, tetapi dengan pola yang cenderung negatif. Penelitian seperti ini telah dilakukan oleh banyak orang, termasuk Landau (1986) dan Russek (1990).

Menurut Luciana dan Nahumuri (2019), ada tiga faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah: 1) peningkatan kebutuhan masyarakat untuk layanan pemerintah; 2) peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat penerima layanan; dan 3) peningkatan tingkat ketidakefisienan layanan yang diberikan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memperoleh penerimaan yang cukup sebagai dasar untuk menentukan berapa banyak uang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel 1.4
Pengeluaran Pemerintah Karesidenan Kedu Tahun 2015-2023

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Karesidenan Kedu
2023	13,415,774,226,273
2022	12,751,034,858,456
2021	12,001,597,593,277
2020	13,319,422,630,000
2019	13,387,814,810,000
2018	11,858,092,979,000
2017	13,053,480,278,000
2016	11,544,577,273,000
2015	11,385,530,955,000

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Dari Tabel 1.4, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, ada peningkatan pengeluaran dari tahun 2015 hingga 2023, meskipun ada beberapa tahun di mana pengeluaran menurun. Dari 2015 ke 2016, terjadi peningkatan dari 11,385,530,955,000 ke 11,544,577,273,000. Pengeluaran terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan nilai 13,415,774,226,273. Terjadi penurunan pada 2018 dibandingkan dengan 2017, dari 13,053,480,278,000 ke 11,858,092,979,000. Pada 2020, ada penurunan dari 2019, namun naik kembali pada 2021. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, di mana pengeluaran meningkat sebesar 664,739,367,817 (dari 12,751,034,858,456 ke 13,415,774,226,273). Penurunan terbesar terjadi dari 2019 ke 2020, dari 13,387,814,810,000 ke 13,319,422,630,000. Meskipun ada tren peningkatan secara keseluruhan, pengeluaran tidak meningkat secara konsisten setiap tahun. Fluktuasi ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan, prioritas anggaran, dan kondisi ekonomi yang beragam.

Menurut Lestari dan Safarina (2023), karena Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengannya jelas. Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan khusus setiap daerah dalam lingkup desentralisasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, alokasi ini direncanakan secara strategis untuk mengurangi perbedaan kemampuan keuangan antar daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah memperoleh manfaat dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara merata, meningkatkan keadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh negeri. Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai penyalur utama dana dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan daerah, pelayanan publik yang lebih baik, kualitas pendidikan yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik, dan pembangunan masyarakat. hidup lebih lama dan lebih sehat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menentukan alokasi dana umum daerah. Metodologi ini menekankan pentingnya memperkuat wilayah dengan tingkat pembangunan sumber daya manusia yang rendah sambil mempertahankan aspirasi pembangunan yang merata secara geografis. Dana Alokasi Umum (DAU) oleh karena itu lebih dari sekedar aliran dana, dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 1.5
Pengeluaran Dana Alokasi Umum Tahun 2015-2023

Tahun	Dana Alokasi Umum Karesidenan Kedu
2023	5,206,274,470,000
2022	5,023,708,699,000
2021	5,189,604,248,000
2020	5,138,007,323,000
2019	5,504,440,036,000
2018	5,280,429,613,000
2017	5,278,751,434,000
2016	5,373,140,230,000
2015	4,916,046,195,000

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Secara umum, Dana Alokasi Umum untuk Karesidenan Kedu menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah Karesidenan Kedu. Terjadi kenaikan signifikan pada periode 2015-2016 dan 2018-2019. Ada beberapa tahun dengan penurunan kecil, terutama pada 2016-2017 dan 2019-2020. Setelah penurunan di beberapa tahun, dana kembali meningkat pada 2023. Perubahan dalam kebijakan fiskal dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi besarnya DAU. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi alokasi dana. Penurunan pada tahun 2019-2020 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan alokasi anggaran untuk berbagai program penanganan pandemi.

Menurut Putra (2024), yang bekerja di KPPN Selong berpendapat bahwa DAU yang ditetapkan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang dapat dibiayai untuk kegiatan dan subkegiatan yang diprioritaskan serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang diatur dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Dengan kata lain, DAU yang ditetapkan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan subkegiatan yang tidak tercantum dalam PMK tersebut. Akibatnya, daerah yang masih bergantung pada pendapatan dari dana perimbangan tidak dapat sepenuhnya menggunakan DAU untuk kebutuhan dan program daerah. Ini termasuk alokasi DAU sebelum Tahun Anggaran 2023 yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan prioritas daerah.

Dari uraian diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dengan menjelaskan secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kiranya pula penulis melakukan penelitian yang mengambil judul **“PENGARUH INVESTASI, ANGKATAN KERJA, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN KEDU TAHUN 2015-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memusatkan perhatian pada berbagai macam masalah tentang pentingnya peran sektor investasi, dana alokasi umum, angkatan kerja, dan

pengeluaran pemerintah maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu?
4. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini berguna untuk menyebutkan secara spesifik maksud dari penelitian baik yang utama maupun tambahan dan dikemukakan secara jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil yang akan dicapai, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu.
2. Mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu.
3. Mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak yang kedepannya bisa dijadikan acuan maupun dilakukan penelitian lanjut mengenai topik yang dibahas pada penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk referensi penelitian di bidang investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah dan dana alokasi umum pertumbuhan ekonomi bagi mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Analisis dampak sektor investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Kedu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.